

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka & Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Kajian Pustaka**

###### **2.1.1.1 Teori Asimetri Informasi (*Asymmetrt Information Theory*)**

Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dan fiskus, ketika fiskus hanya mengetahui sedikit informasi mengenai perusahaan dan kinerja manajemen, sedangkan manajemen mengetahui lebih banyak informasi mengenai lingkungan perusahaan, kapasitas diri, dan kondisi perusahaan. Oleh karena itu fiskus harus menciptakan sistem yang dapat mengawasi kinerja manajemen agar sesuai dengan harapannya (Yeni et al., 2024).

Asimetri informasi yaitu dimana manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan kepentingan fiskus (prinsipal) berbanding balik dengan keinginan manajemen. Asimetri informasi memberikan efek yang nyata pada keputusan keuangan maupun finansial (Septiawan et al., 2021)

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam (Septiawan et al., 2021) menyatakan permasalahan tersebut antara lain:

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen-benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Hubungan asimetri Informasi dengan *tax avoidance* yaitu perusahaan sebagai manajemen yang mengetahui lebih banyak tentang laporan keuangan termasuk laba dan pajak yang harus dibayar dibandingkan dengan pemerintah (fiskus).

### **2.1.1.2 Akuntansi**

#### **2.1.1.2.1 Definisi Akuntansi**

Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. (Agie Hanggara, 2019). Sedangkan menurut (Tutik et al., 2022) Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan sebagai informasi berkaitan dengan kondisi keuangan suatu entitas. Secara garis besar akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mengatakan Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter,

transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Dalam artian, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan menyusun ikhtisar kejadian atas transaksi keuangan yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran yang terkait dengan keuangan bertujuan sebagai penilaian dan pengambilan keputusan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi berkaitan dengan kondisi keuangan suatu entitas.

#### **2.1.1.1.2 Tujuan Akuntansi**

Tujuan akuntansi keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Umum**

- a) Untuk memberi informasi keuangan yang handal dan dapat dipercaya berkaitan dengan kewajiban, modal dan sumber ekonomi.
- b) Untuk memberi informasi yang terpercaya tentang perubahan-perubahan yang ada pada sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan yang terjadi karena adanya kegiatan usaha.
- c) Untuk memberi informasi keuangan yang dapat membantu penggunaanya dalam memperkirakan potensi perusahaan untuk memperoleh laba.

- d) Untuk memberi informasi penting lainnya, berkaitan dengan perubahan perubahan sumber ekonomi dan kewajiban.
- e) Untuk menyampaikan secara terperinci informasi lain yang masih memiliki keterkaitan dengan laporan keuangan yang masih relevan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dalam hal ini adalah internal dan juga eksternal perusahaan, internal seperti manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan.

## 2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

### **2.1.1.1.3 Fungsi Akuntansi**

Beberapa fungsi dari akuntansi antara lain menurut (Agie Hanggara, 2019) adalah sebagai berikut:

1. *Recording Report* atau merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi.
2. Melindungi Properti dan Aset : untuk menghitung jumlah penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu.

3. Mengkomunikasikan Hasil : untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu.
4. *Meeting Legal* : untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi persyaratan hukum.
5. Mengklasifikasikan : untuk memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entri.

#### **2.1.1.1.4 Prinsip Akuntansi**

10 prinsip akuntansi menurut (Agie Hanggara, 2019) yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*) merupakan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan baik untuk memperoleh barang maupun jasa.
2. Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*) menjelaskan tentang sifat dan komponen, pengukuran, maupun pengakuan pendapatan sebagai salah satu komponen penyusunan laporan laba rugi.
3. Prinsip Berpasangan (*Matching Principle*) menjelaskan masalah pengaturan pembebanan biaya pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil, sehingga hasil akan diakui pada periode menurut prinsip dasar pengakuan hasil, sedangkan biayanya dibebankan sesuai periode tersebut.
4. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*), prosedur dan prinsip akuntansi yang sama harus diterapkan dalam periode yang bersangkutan, sehingga peristiwa ekonomis yang sejenis akan dicatat dan dilaporkan secara konsisten. Oleh karena itulah, laporan keuangan akan dapat diperbandingkan.

5. Prinsip Pengungkapan secara Lengkap (*Full Disclosure Principle*) mengharuskan laporan keuangan dibentuk dan disajikan dari peristiwa ekonomi yang memengaruhi perusahaan dalam suatu periode. Laporan keuangan diharapkan cukup informatif sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memperoleh manfaat dari informasi keuangan tersebut. Penyajian laporan keuangan tersebut haruslah lengkap (*full*), jujur (*fair*), dan memadai (*adequate*; mencakup informasi minimal yang memang harus disajikan).
6. Prinsip Entitas Ekonomi (*Economic Entity Principle*) adalah sistem informasi ekonomi harus berdiri sendiri. Aset yang dimiliki oleh perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Sama dengan semua pencatatan transaksi keuangan yang pernah dilakukan di perusahaan harus dipisah (tidak boleh dicampur) dengan pencatatan milik pribadi dan juga hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan pribadi harus dipisah.
7. Prinsip Periode Akuntansi yaitu pelaporan dan penilaian keuangan usaha pada perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Periode yang digunakan dalam digunakan yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.
8. Prinsip Satuan Moneter (*Monetary Unit*) adalah segala bentuk pencatatan transaksi harus dinyatakan dalam bentuk yang bisa diukur. Pencatatan transaksi keuangan hanya dapat diukur dan dinilai atau dinyatakan dalam bentuk satuan uang atau mata uang.

9. Prinsip Kestinambungan Usaha (*Going Concern*) yaitu dimana sebuah bisnis atau usaha akan berjalan secara terus menerus dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian atau pembubaran usaha di tengah jalan terkecuali jika bisnis tersebut memiliki masalah yang dapat menyebabkan pembubaran bisnis
10. Prinsip Materialitas (*Materiality Principle*) adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Artinya, suatu informasi akuntansi punya nominal dan bisa dijual. *Accountants International Study Group* memberikan pengertian materialitas sebagai "persoalan pertimbangan profesional penting. Pos - pos tertentu harus dianggap material bila pengetahuan tertentu dianggap secara wajar menimbulkan pengaruh bagi pengguna laporan keuangan." Menurut APB Statement No. 4, prinsip materialitas mengandung arti bahwa laporan keuangan hanya menyangkut informasi yang dianggap penting (material) dalam memengaruhi penilaian.

#### **2.1.1.1.5 Bidang Akuntansi**

Seperti diketahui bersama, bahwa saat ini transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan sangat kompleks seiring dengan perkembangan perusahaan dan kegiatan bisnis yang dilakukan. Kondisi ini menuntut perusahaan harus dapat penyajian berbagai jenis informasi keuangan yang cepat dan akurat. Dengan demikian, maka setiap perusahaan pasti membutuhkan ahli dalam bidang akuntansi yang bisa membantu untuk menyediakan segala informasi keuangan sehingga dapat memenuhi

beberapa kebutuhan jika ingin digunakan (Tutik et al., 2022). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka ilmu akuntansi sendiri memiliki berbagai macam bidang - bidang akuntansi menurut (Waluyo, 2017) sebagai berikut:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*) adalah bidang akuntansi yang memiliki kegiatan seperti mencatat semua kegiatan *financial* yang berkaitan dengan akuntansi atau yang sudah dikhususkan untuk memproses pencatatan ekonomi secara keseluruhan seperti pencatatan transaksi keuangan hingga penyajian data yang sudah menjadi bentuk laporan keuangan perusahaan. Bertujuan untuk menyajikan suatu data dari semua transaksi keuangan yang terjadi pada suatu periode tertentu pada perusahaan dan membuat suatu laporan keuangan (*Finance statment*).
2. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*) adalah bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari hasil yang telah dicatat dan laporan keuangan dari suatu badan, laporan bisa dari perusahaan dan bisa juga dari pemerintah. Yang berhubungan langsung dengan bagian audit secara bebas untuk mendapatkan informasi akuntansi yang akan disajikan nanti sehingga informasi akuntansi tersebut bisa disajikan dan dapat di percaya tetapi juga memiliki tujuan yang lain seperti taat terhadap kebijakan yang ada. Bertujuan mematuhi prosedur dan penilaian efesiensi dan efektifitas dari suatu kegiatan.

3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*) adalah salah satu bidang akuntansi yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi yang berkaitan kepada manajemen dalam menjalankan suatu usahanya. Kegunaan dari akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan suatu kegiatan dari perusahaan, memonitori arus kan dari perusahaan, dan juga untuk menilai alternatif dalam pengambilan suatu keputusan.
4. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*) berfokus pada penetapan dan pengendalian biaya, sebagai fungsi utama akuntansi biaya yaitu mengumpulkan data biaya, menganalisis data biaya, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, yang digunakan oleh pihak manajemen sebagai alat pengendalian kegiatan dan menyusun rencana biaya di masa mendatang.
5. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*) bertujuan untuk membantu klien mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Termasuk penghitungan pajak dan persiapan pengembalian pajak agar suatu perusahaan bisa membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, dan juga untuk menyajikan hubungan dari sebuah transaksi - transaksi terhadap tarif serta pajak yang sudah ada. Akuntansi perpajakan bisa digunakan untuk meminimalisir besarnya suatu pajak yang wajib dibayar kepada pihak peme-rintah akan tetapi tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang telah di tetapkan.
6. Akuntansi Pemerintahan (*Governmental Accounting*) adalah salah satu bidang akuntansi yang digunakan untuk menerapkan di lembaga pemerintahan.

Bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian serta memberikan pengawas keuangan pemerintah atau keuangan negara. Dikhususkan dari dalam melakukan pencatatan dan memberikan pelaporan suatu transaksi - transaksi yang terjadi di badan pemerintahan atau negara. Bertugas untuk menyajikan suatu informasi yang sudah berupa data akuntansi yang berasal dari berbagai aspek pengolahan keuangan pemerintah dan kemudian akan melakukan suatu pengenda

7. Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information Systems*) melibatkan pengembangan, instalasi, implementasi, dan pemantauan prosedur yang digunakan dalam penentuan proses kedepannya. dalam bidang akuntansi ini ada pengumpulan data serta pelaporan keuang-an. Bertujuan memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan.
8. Akuntansi Syariah (*Islamic Accounting*) adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Biasanya Bank-bank syariah yang menerapkan akuntansi syariah, sifat transaksi mereka juga berbeda dari bank konvensional.

#### **2.1.1.2 Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakannya bersifat netral (tidak memihak)

terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi oleh karena itu, prinsip - prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, hanya memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan Keuangan fiskal yang berbeda. Kewajiban pembukuan, seperti telah dijelaskan merujuk pada penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan prinsip dasar pembukuan, haruslah diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain (Waluyo, 2017).

#### **2.1.1.2.1 Definisi Pajak**

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "*surplus*" nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Siti, 2016). Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang - barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Adrian, 2011). Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut (B. Santoso, 1986) yaitu sebagai berikut :

1. Definisi *Leroy Beaulieu* berbunyi : pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
2. Definisi *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919), pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontra prestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu sasaran pemajakan (*tatbestand*), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.
3. Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh negara dari rakyat berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, untuk membiayai pengeluaran negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai investasi publik dan menyediakan barang serta jasa kolektif. Definisi pajak dari berbagai ahli menekankan bahwa pajak merupakan bantuan atau iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk mendukung kebutuhan negara dan kepentingan umum.

### **2.1.1.2.2 Jenis Pajak**

Menurut (Siti, 2016) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

#### **1. Menurut Golongan**

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut ini :

- a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b) b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

#### **2. Menurut Sifat**

Pajak menurut sifat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut ini :

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungut dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut ini :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### **2.1.1.2.3 Fungsi Pajak**

Menurut (Siti, 2016) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

##### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

## 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **2.1.1.3 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri (Y. Santoso & Priantinah, 2016).

*Profitability ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan (Made, 2009). Menurut (Sukmawati et al., 2016) rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Menurut (Kasmir, 2017) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari

penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya. Rasio Profitabilitas atau rasio rentabilitas dibagi dua yaitu sebagai berikut.

1. Rentabilitas ekonomi, yaitu dengan membandingkan laba usaha dengan seluruh modal (modal sendiri dan asing).
2. Rentabilitas usaha (sendiri), yaitu dengan membandingkan laba yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Rentabilitas tinggi lebih penting dari keuntungan yang besar.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah yang telah berkerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, untuk periode atau beberapa periode selanjutnya. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target

yang telah ditentukan, akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depannya. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.

### **2.1.3.1 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

Seperti rasio-rasio lain yang sudah dibahas sebelumnya, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak - pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut (Kasmir, 2017), yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;

Sementara itu, manfaat yang diperoleh rasio profitabilitas adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

#### **2.1.1.3.1 Jenis dan Metode Pengukuran Profitabilitas**

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.

Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin

sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

Menurut (Made, 2009) terdapat beberapa cara untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas, yaitu:

1. *Return on Assets (ROA)*

$$\text{Rumus : } ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Asset}}$$

ROA mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan (Sukmawati et al., 2016). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.

2. *Return on Equity (ROE)*

$$\text{Rumus : } ROE = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Equity}}$$

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham, untuk mengetahui efektivitas dan

efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan.

### 3. *Profit Margin Ratio*

Profit margin ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. Profit margin ratio dibedakan menjadi:

#### a. *Net Profit Margin*

$$\text{Rumus : Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan.

#### b. *Operating Profit Margin*

$$\text{Rumus : Operating Profit Margin} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax}}{\text{Sales}}$$

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba.

c. *Gross Profit Margin*

$$\text{Rumus : } \textit{Gross Profit Margin} = \frac{\textit{Gross Profit}}{\textit{Sales}}$$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai bagian produksi.

4. *Basic Earning Power*

$$\text{Rumus : } \textit{Basic Earning Power} = \frac{\textit{Earning Before Intersert and Tax}}{\textit{Total Asset}}$$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh investasi yang telah dilakukan perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak.

**2.1.1.3.2 Return on Assets (ROA)**

$$\text{Rumus : } \textit{ROA} = \frac{\textit{Earning After Tax}}{\textit{Total Asset}}$$

1. *Return on Assets (ROA)*

ROA mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan (Sukmawati et al., 2016). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.

## 2. *Earning After Tax* (Laba Setelah Pajak)

*Earning after tax (EAT)* adalah laba yang didapatkan dari jumlah pengurangan pendapatan dan biaya. Pengukuran kenaikan aktiva sangat bergantung pada pendapatan, biaya, dan laba bersih setelah pajak, yaitu laba setelah dikurangi pajak penghasilan yang merupakan jumlah terakhir dalam laporan laba rugi dan merupakan kenaikan terhadap ekuitas pemilik dari efektifitas pencipta laba selama periode bersangkutan (Irfan et al., 2019)

## 3. *Total Asset*

Menurut (Zamzami & Nusa, 2016) Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai-akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (PSAK). Menurut PSAK 19, aset didefinisikan sebagai sumber daya yang :

- (a) dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan;
- (b) manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas.

Karakter utama dari aset yang dimiliki perusahaan adalah dapat membawa keuntungan di masa mendatang. Aset ini dapat diperoleh dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri dan juga didapat dengan adanya kewanban kepada pihak lain (contoh: utang dagang, utang bank). Perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang disebut aset.

Aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar (current asset) dan aset tidak lancar (non-current asset).

#### a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber-sumber ekonomik yang dapat dicairkan menjadi kas, diperdagangkan, atau dipakai habis dalam waktu satu tahun sejak tanggal neraca (PSAK). Menurut PSAK 1, aset lancar adalah suatu aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut (a) diperkirakan dapat direalisasikan atau dimaksudkan untuk dijual atau dipakai, dalam siklus operasi normal entitas; (b) dimiliki dengan tujuan utama untuk diperdagangkan; (c) diperkirakan dapat direalisasikan dalam dua belas bulan setelah tanggal neraca; atau (d) kas atau setara kas, kecuali terdapat pembatasan untuk ditukarkan atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya dalam dua belas bulan setelah tanggal neraca. Aset lancar biasanya memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Berikut adalah nama akun pada aset lancar.

## b. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar memiliki masa manfaat yang lebih lama dari satu tahun. Aset tidak lancar digolongkan menjadi tiga yaitu, aset tetap (PSAK 16), aset tidak berwujud (PSAK 19), dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang (PSAK 50, 55, 60).

### 1. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, direntalkan, maupun untuk tujuan administratif yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi (PSAK) atau dengan penjelasan bahwa aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.

### 2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dilihat. Sangat sulit untuk mengukur secara tepat nilai aset tak berwujud. Penyajian aset di neraca adalah sesuai dengan urutan likuiditasnya. Pada sisi aset, kas adalah yang paling tinggi urutan likuiditasnya dalam neraca sehingga ditempatkan paling atas dan kemudian disusul piutang, persediaan, dan lain-lain yang urutan likuiditasnya semakin rendah. Likuiditas di sini adalah kemampuan aset tersebut untuk dapat

segera dicairkan menjadi uang atau kas. Penyajian aset di neraca diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

### 3. Aset keuangan yang bersifat jangka panjang

Salah satu bentuk aset keuangan yang bersifat jangka panjang adalah Investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan dalam jangka panjang baik untuk memperoleh pendapatan tetap (berupa bunga) dan pendapatan tidak tetap (berupa dividen) maupun untuk menguasai perusahaan lain.

Total aset merupakan jumlah dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, terdiri dari aset lancar dan aset tetap (Kasmir, 2017).

#### **2.1.1.4 *Capital Intensity***

*Capital Intensity* atau intensitas modal adalah rasio antara fixed asset terhadap total aset dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Kasmir, 2017). *Capital Intensity* dapat menjadi faktor penentu kemungkinan suatu perusahaan mengalami tekanan keuangan (Pristin & Sri, 2024). Intensitas modal ialah kegiatan investasi suatu perusahaan yang ada kaitannya dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap. Intensitas modal seringkali dihubungkan dengan jumlah aset tetap dan persediaan yang dipunyai suatu perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Konsep *Capital Intensity* mempunyai hubungan dengan arus modal dimana teori keunggulan kompetitif dari

Heckscher Ohlin Mundell adalah adanya hubungan antara modal internasional dengan perdagangan karena disebabkan oleh adanya insentif pergerakan modal. jika perdagangan dibuka. Lebih lanjut, teori terbaru menemukan bahwa *Capital Intensity* yang tinggi akan menerima aliran modal internasional yang lebih besar dibandingkan negara lain yang intensitas modalnya rendah.

Rasio intensitas modal atau intensitas aset tetap adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muzakki & Darsono, 2015). Besarnya modal yang diinvestasikan pada aset tetap tidak terlepas dari sumber pembiayaan yang pada umumnya berasal dari utang perusahaan (Nugraha & Mulyani, 2019).

#### **2.1.1.4.1 Metode Pengukuran *Capital Intensity***

Menurut (Yoehana, 2013) dalam (Indradi, 2018) *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital Intensity Ratio* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan (Cahyati & Darma, 2022).

Cara pengukuran *Capital Intensity* menurut (Antony et al., 2012) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Sales Revenue}}{\text{Property, Plant, and Equipment}}$$

Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang secara langsung mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Menurut (Indradi, 2018) berdasarkan penelitian yang dilakukan (Rodríguez & Arias, 2012) variabel ini diukur menggunakan rasio antara aktiva tetap dibagi dengan total aset.

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Cara pengukuran capital intensity menurut (Avivi, 2021) yaitu :

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Total Asset}}$$

#### **2.1.1.4.2 Capital Intensity Ratio (Rasio Intensitas Modal)**

Rumus :

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

- Total Aset Tetap Bersih (*Net Fixed Assets*)

Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, direntalkan, maupun untuk tujuan administratif yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi

(PSAK) atau dengan penjelasan bahwa aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun (Zamzami & Nusa, 2016). Total Aset Tetap Bersih (*Net Fixed Assets*) adalah nilai aset tetap perusahaan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan (Kasmir, 2017).

#### **2.1.1.5 *Inventory Intensity***

*Inventory Intensity* yaitu suatu pengukuran terhadap jumlah persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Latifah, 2018). *Inventory intensity* atau intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. Perusahaan yang memiliki persediaan besar akan memiliki beban yang besar atau membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan tersebut. PSAK No. 14 (revisi 2008) menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya (Anindyka et al., 2018). Intensitas persediaan berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. *Inventory intensity* atau intensitas persediaan merujuk pada ukuran yang membandingkan total persediaan perusahaan dengan total aset perusahaan (Siregar & Widyawanti, 2016). Persediaan perusahaan merupakan aspek penting bagi perusahaan, karena dapat membantu menunjang aktivitas perusahaan untuk mendapatkan laba (Yahya et al., 2022). Tingginya tingkat persediaan menyebabkan adanya biaya pemeliharaan yang menyebabkan adanya beban yang di tanggung perusahaan, beban yang ada akan

membuat laba perusahaan menjadi menurun, dan hal tersebut dapat mengurangi beban pajak (Hidayat & Fitria, 2018).

*Inventory intensity* digunakan untuk mengukur besar kecilnya inventaris/persediaan yang di investasikan pada perusahaan (Anindyka et al., 2018). *Inventory intensity* ini juga tergolong salah satu alat yang mampu dipakai perusahaan dalam melakukan pengukuran taraf efisiensi perusahaan diantara barang yang dijual dengan inventaris yang terdapat dalam suatu perusahaan (Azizah, 2018).

#### **2.1.1.5.1 Metode Pengukuran Inventory Intensity**

Menurut (Septi et al., 2015) Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar Perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan. (Siregar, 2016) menyatakan bahwa *Inventory intensity* atau bisa disebut juga dengan intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Cara pengukuran *Inventory Intensity* yaitu sebagai berikut :

$$IRR = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

#### **2.1.1.5.2 Inventory Intensity Ratio (Rasio Intensitas Persediaan)**

Rumus:

$$IRR = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

- Total Persediaan

Menurut (Soemarso, 2007) Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut menjadi barang jadi yang pada akhirnya akan dijual untuk memperoleh penghasilan. Dalam akuntansi ada istilah persediaan dan harga pokok penjualan.

#### **2.1.1.6 Tax Avoidance**

*Tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak, *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Chairil, 2018).

Penghindaran pajak menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) yaitu upaya untuk mengurangi besarnya nilai pajak eksplisit melalui upaya perencanaan pajak dalam rentang legal dan ilegal. Tindakan penghindaran pajak dilakukan secara legal (*lawful*)

dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar (Xynas, 2010).

### 2.1.1.6.1 Metode Pengukuran Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Halim et al., 2020).

Cara pengukuran *Tax Avoidance* menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) yaitu sebagai berikut :

1.  $GAA = \frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$
2.  $Current\ ETR = \frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$
3.  $Cash\ ETR = \frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$
4.  $Long - run\ cash\ ETR = \frac{\sum(\text{Worldwide cash tax paid})}{\sum(\text{Worldwide total pre-tax accounting income})}$
5.  $ETR\ Differential = \text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$
6.  $DTAX =$  Error term from the following regression:  

$$\begin{aligned} & ETR\ differential \times \text{Pre - tax book} \\ & \text{income} = a + b \times \text{Controls} + e \end{aligned}$$
7.  $Total\ BTD = \text{Pre - tax book income} - \left( \frac{(U.S.CTE + Fgn\ CTE)}{U.S.STR - (NOL_t - NOL_{t-1})} \right)$
8.  $Temporary\ BTD = \frac{\text{Deferred tax expense}}{U.S.STR}$
9.  $Abnormal\ total\ BTD = \frac{\text{Residual from BTD}}{TA_{it}} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$

10. Unrecognized tax benefits = Disclosed amount post – FIN48

11. Tax shelteractivity = Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter

12. Marginal tax rate = Simulated marginal tax rate

#### **2.1.1.6.2 CETR (*Cash ETR*)**

Rumus :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Total pre-tax accounting income}}$$

##### *1. Cash Tax Paid*

Menurut (White et al., 2003) :

*“Cash taxes paid represent the actual amount of income taxes remitted to tax authorities during the period, as opposed to income tax expense which includes deferred tax components.”*

Artinya: Pajak yang dibayar secara tunai mencerminkan jumlah pajak penghasilan yang benar-benar disetor ke otoritas pajak selama periode tertentu, berbeda dengan beban pajak penghasilan yang dapat mencakup komponen pajak tangguhan.

Menurut (Kieso et al., 2019):

*“Cash paid for income taxes is reported in the statement of cash flows under operating activities and reflects the actual cash outflow related to income tax obligations.”*

Artinya: Kas yang dibayarkan untuk pajak penghasilan dilaporkan dalam laporan arus kas di bagian aktivitas operasi dan mencerminkan arus kas keluar yang nyata terkait kewajiban pajak penghasilan.

## 2. Total pre-tax Accounting Income

Menurut (Setiadi et al., 2024) *Total pre-tax Accounting Income* atau Laba Kotor adalah total pendapatan setelah dikurangkan dengan biaya langsung produksi atau penyediaan barang atau jasa. Laba kotor tidak memperhitungkan biaya tetap atau biaya operasional lainnya.

### 2.1.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ratumas Salma Zulaika (2024)	Pengaruh <i>Sales Growth</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Indikasi <i>Tax</i>	<b>Variabel Independen :</b> <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap indikasi <i>Tax Avoidance</i> sedangkan <i>Sales Growth</i> , Profitabilitas dan <i>Inventory Intensity</i>

		<i>Avoidance</i>	<b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	tidak berpengaruh terhadap indikasi <i>Tax Avoidance</i> .
2	Fadiyah Rama Wangsa (2024)	Pengaruh <i>Capital Intensity, Inventory Intensity, Leverage,</i> Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022)	<b>Variabel</b> <b>Independen :</b> <i>Capital Intensity, Leverage, Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas <b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	<i>Capital Intensity, Leverage</i> dan Profitabilitas tidak mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan, <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	Rezi Putri Wardani (2024)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax</i>	<b>Independen :</b> <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i>	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Inventory Intensity</i>

		<i>Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Periode 2018 – 2022)	<b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Desy Kusumastuti (2023)	Pengaruh <i>Capital Intensity, Inventory Intensity, Return On Assets</i> (Roa) Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus Terhadap Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2021)	<b>Independen :</b> <i>Capital Intensity, Inventory Intensity, dan ROA</i> <b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	<i>Capital Intensity, Inventory Intensity, Return On Assets</i> (ROA) berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5	Hardian Daldiyono	Pengaruh <i>Inventory Intensity, Capital</i>	<b>Variabel</b> <b>Independen :</b>	<i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas memiliki

	(2024)	<i>Intensity</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Studi Kasus Perusahaan <i>Agriculture</i> yang Terdaftar Di BEI 2021-2023	<i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas <b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	pengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Namun, <i>Inventory Intensity</i> ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya <i>Tax Avoidance</i> .
6	Lamesya Fazilah, Afridian Wirahadi Ahmad, Dita Maretha Rissi (2024)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<b>Variabel</b> <b>Independen :</b> Kepemilikan Institusional, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas <b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan Institusional, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7	Tasya Ariska	Pengaruh	<b>Variabel</b>	Profitabilitas dan

	Br Ginting Munthe (2024)	Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor <i>Food And Beverage</i> yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022	<b>Independen :</b> <i>Capital Intensity,</i> <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas <b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	Muhammad Akbar Ridha (2025)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity,</i> <i>Inventory Intensity,</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub	<b>Variabel</b> <b>Independen :</b> <i>Capital Intensity,</i> <i>Leverage,</i> <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas <b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan

		Sektor Tembakau yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI Periode 2021-2023)		terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	Rio Kurniawan (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Perdagangan	<b>Variabel Independen :</b> <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas <b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

		Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022)		Avoidance, Sales Growth tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
10	Dwi Martia Nursari1, Nazmel Nazir (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020	<b>Variabel Independen :</b> <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas <b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> . <i>Capital Intensity</i> tidak mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> .
11	Ida Ayu	Pengaruh	<b>Variabel</b>	<i>Capital Intensity</i> dan

	Intan Dwiyanti, I Ketut Jati (2019)	Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak	<b>Independen :</b> <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas <b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> Penghindaran Pajak	<i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif pada Penghindaran Pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif pada Penghindaran.
--	--	---	--	--

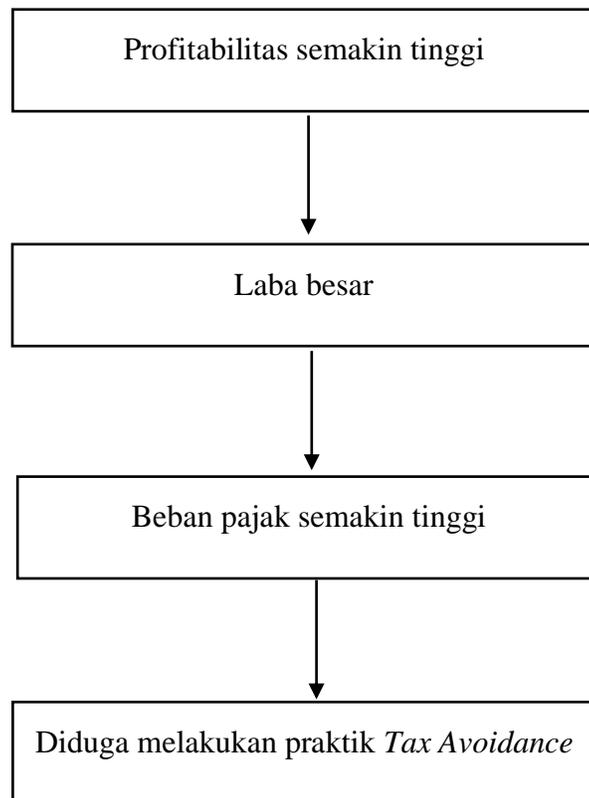
## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah kapabilitas sebuah perusahaan dalam memperoleh laba, yang ditunjukkan oleh berapa banyak yang dihasilkan dari penjualan dan berapa banyak yang dihasilkan dari investasi (Novika & Siswanti, 2022). Menurut (Sukmawati et al., 2016) rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Menurut (Kasmir, 2017) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Mengacu pada konsep teori keagenan yang menekankan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) yang ingin meningkatkan pendapatan negara melalui pajak sedangkan perusahaan (*agent*) ingin meminimalkan beban pajak agar tidak

mengurangi laba perusahaan dengan melakukan *tax avoidance* (Septiawan et al., 2021). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar insentif yang dimiliki untuk melakukan penghindaran pajak karena beban pajak yang dikenakan atas laba yang besar juga semakin tinggi (Hanum & Zulaikha, 2013).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Martia Nursari1, Nazmel Nazir (2023) dan Rio Kurniawan (2023) yang menunjukkan hasil yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap indikasi *Tax Avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratumas Salma Zulaika (2024) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap indikasi *Tax Avoidance*. Kerangka pola pikir Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, yaitu sebagai berikut

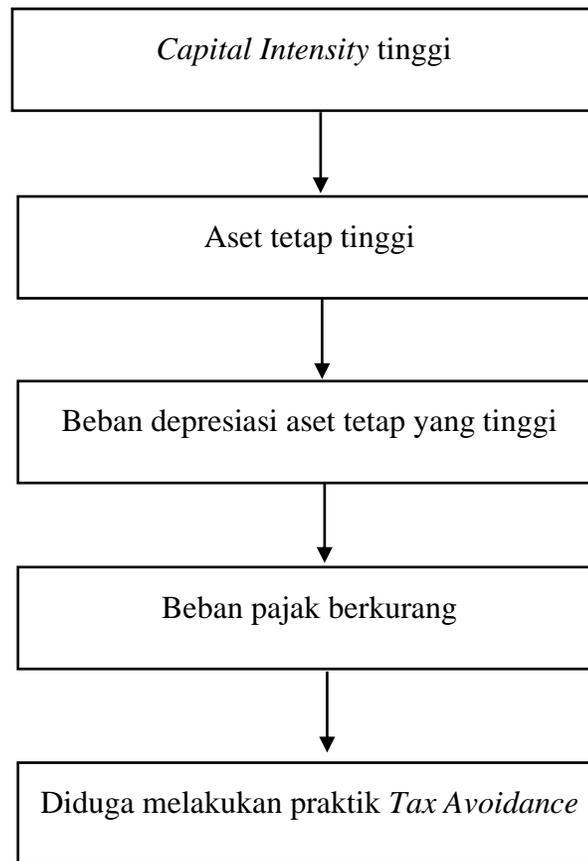


## **Gambar 2. 1 Kerangka Pemiikiran Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

### **2.2.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Rasio intensitas modal dapat menunjukkan penggunaan aktiva efisiensi untuk menghasilkan penjualan (Empiris, 2010). Dalam hal ini, perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi dianggap sangat bergantung pada aset tetap untuk menghasilkan penjualan guna menghasilkan keuntungan (Parrino, 2017). Manajer melakukan investasi terhadap dana yang tidak terpakai suatu perusahaan ke dalam aset tetap, dimana tujuannya untuk mengurangi beban pajak dari pemanfaatan penyusutan aset tetap. Sehingga perusahaan dengan *capital intensity* tinggi dianggap memiliki jumlah aset tetap yang menghasilkan beban depresiasi aset tetap yang tinggi. Dengan demikian, perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan efisiensi beban pajak (Dwiyanti & Jati, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Intan Dwiyanti, I Ketut Jati (2019) dan Hardian Daldiyono (2024) yang menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap indikasi *Tax Avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tasya Ariska Br Ginting Munthe (2024) yang menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh positif terhadap indikasi *Tax Avoidance*. Kerangka pola pikir *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, yaitu sebagai berikut :



**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

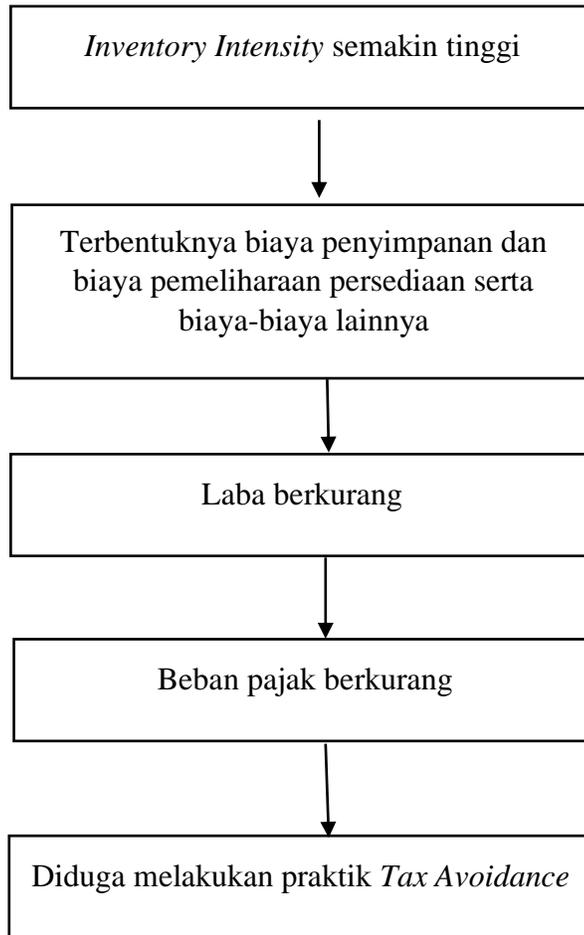
### **2.2.3 Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Banyaknya persediaan yang terkumpul di gudang dapat menurunkan laba perusahaan karena terbentuknya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan persediaan serta biaya-biaya lainnya yang dapat menurunkan laba perusahaan dan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan (Feber, 2021).

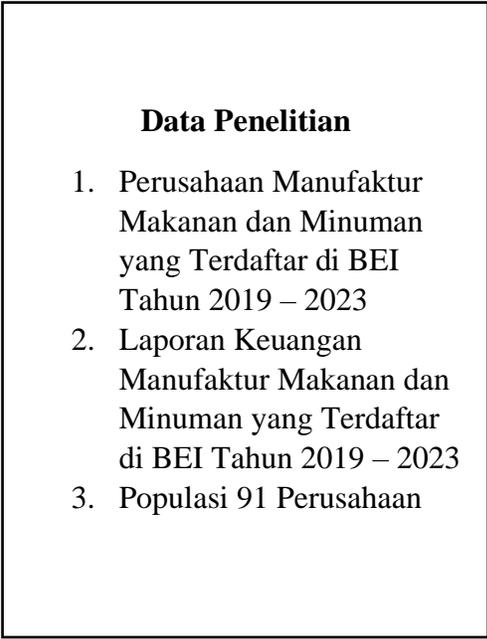
Intensitas persediaan yang besar pada perusahaan bisa berdampak pada laba perusahaan yang menurun hal ini disebabkan karena adanya pembiayaan tambahan yang ada di dalam inventaris. Turunnya laba perusahaan mengakibatkan pajak yang

harus dibayar perusahaan jadi lebih kecil. Semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan akan berakibat pada tingginya taraf penghindaran pajak suatu perusahaan (Dwi & Nazir, 2023) *Inventory intensity* menunjukkan sejauh mana aset suatu perusahaan digunakan untuk persediaan. Investasi tersebut meningkatkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan inventaris, yang pada akhirnya akan membuat laba perusahaan menjadi kecil. Berkurangnya laba perusahaan akan menyebabkan berkurangnya beban pajak (Artinasari & Mildawati, 2018).

Maka *Inventory Intensity* dapat mempengaruhi tax avoidance karena tingginya *inventory intensity* memberikan peluang bagi perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak melalui pengelolaan persediaan, sehingga beban pajak dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy Kusumastuti (2023) dan Lamesya Fazilah, Afridian Wirahadi Ahmad, Dita Maretha Rissi (2024) yang menunjukkan bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Rezi Putri Wardani (2024) yang menunjukkan hasil bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Kerangka pola pikir *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, yaitu sebagai berikut :



**Gambar 2. 3** Kerangka Pemiikiran *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*



**Gambar 2. 4 Teori dan Referensi yang dipakai**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Menurut (Sugiyono, 2019) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka, hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H3 : *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.